



Katalog: 5404004

2013 - 2015



PROFIL PELABUHAN PERIKANAN

2013 - 2015



PROFIL PELABUHAN PERIKANAN

PROFIL PELABUHAN PERIKANAN

2013-2015

Nomor ISBN: 978-979-064-986-6

Nomor Publikasi: 05220.1608

Katalog: 5404004

Ukuran Buku: 17,6 Cm x 25 Cm

Jumlah Halaman: viii + 50 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Perikanan, BPS

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Perikanan, BPS

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Penjelasan Gambar Kulit/Cover Explanation:

1. Sejumlah kapal ikan tradisional bersandar di dermaga PPS Bitung Sulawesi Utara
2. Sejumlah kapal ikan tradisional bersandar di dermaga PPN Pengambangan Bali
3. Warga yang sedang menyaksikan hasil tangkapan ikan nelayan di PPS Lampulo Aceh

Sumber Gambar:

[http://www.aktual.com/revitalisasi-pelabuhan-perikanan-bitung/;](http://www.aktual.com/revitalisasi-pelabuhan-perikanan-bitung/)

[http://waanfish.blogspot.co.id/p/pelabuhan-perikanan-nusantara_11.html;](http://waanfish.blogspot.co.id/p/pelabuhan-perikanan-nusantara_11.html)

<http://beritadaerah.co.id/tag/perikanan/page/6/>

.....

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Pelabuhan Perikanan 2013 - 2015 ini merupakan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara rutin setiap triwulan dan bersumber dari seluruh PP yang tersebar di 22 provinsi yang ada di Indonesia. Data yang dikumpulkan antara lain profil pelabuhan perikanan menurut berbagai kategori dan rata-rata perahu/kapal yang mendarat setiap hari.

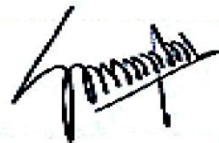
Pengumpulan data dilakukan terhadap tiga jenis PP, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) atau Pelabuhan Perikanan Tipe A, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) atau Pelabuhan Perikanan Tipe B, dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Tipe C. Data tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran profil pelabuhan perikanan di Indonesia.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data, terutama bagi pemerintah dalam meningkatkan fungsi PP yang ada di Indonesia. Kritik dan saran dari semua pihak akan dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, September 2016

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Suhariyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	1
1.3. Sistematika Penulisan	2
II. METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data	3
2.2. Metode Pengumpulan Data	3
2.3. Pengolahan Data	3
2.4. Konsep dan Definisi	4
III. PROFIL PELABUHAN PERIKANAN	9
3.1. Pelabuhan Perikanan di Indonesia	9
3.2. Keberadaan TPI di Pelabuhan Perikanan	10
3.3. Penjualan Ikan pada TPI di Pelabuhan Perikanan	11
3.4. Penjualan Ikan Selain di TPI	13
3.5. Pungutan Retribusi	15
3.6. Pendaratan Perahu/Kapal di Pelabuhan Perikanan	17
LAMPIRAN	45

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Provinsi dan Kategori, 2013 – 2015	21
Tabel 2. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Provinsi dan Keberadaan TPI, 2013 – 2015	22
Tabel 3. Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Memiliki TPI Menurut Provinsi dan Penjualan Ikan di TPI, 2013 – 2015	24
Tabel 4. Rata-rata Persentase Penjualan Ikan di TPI yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI, 2013 – 2015	26
Tabel 5. Jumlah PP yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI Menurut Provinsi dan Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI, 2013 – 2015	27
Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Tidak Memiliki TPI Menurut Provinsi dan Tujuan Penjualan Ikan, 2013 – 2015	30
Tabel 7. Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Provinsi dan Pungutan Retribusi, 2013 – 2015	36
Tabel 8. Rata-rata Persentase Pungutan Retribusi pada PP Menurut Provinsi, 2013 – 2015	37
Tabel 9. Rata-rata perahu/Kapal yang Mendarat Setiap Hari Menurut Provinsi dan Bulan, 2013 - 2015	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Jumlah PP Menurut Provinsi, 2013 - 2015	9
Gambar 3.2. Jumlah PP Menurut Keberadaan TPI, 2013 – 2015	10
Gambar 3.3. Jumlah PP yang Memiliki TPI Menurut Penjualan Ikan di TPI, 2013 - 2015	11
Gambar 3.4. Rata-rata Persentase Penjualan Ikan di TPI yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI Menurut Provinsi, 2013 - 2015	12
Gambar 3.5. Jumlah PP yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI Menurut Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI, 2013 - 2015	13
Gambar 3.6. Jumlah PP yang Tidak Memiliki TPI Menurut Tujuan Penjualan Ikan, 2013 - 2015	14
Gambar 3.7. Jumlah PP Menurut Pungutan Retribusi, 2013 - 2015	15
Gambar 3.8. Rata-rata Persentase Pungutan Retribusi pada PP Menurut Provinsi, 2013 – 2015	16
Gambar 3.9. Rata-rata Perahu/Kapal yang Mendarat Setiap Hari Menurut Provinsi, 2013 – 2015	17

1.1. Latar Belakang

Perikanan merupakan salah satu subsektor dari sektor pertanian yang mempunyai peranan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Bidang kelautan dan perikanan berperan sangat besar bagi pembangunan di wilayah Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam. Guna mengetahui potensi dan peranan subsektor ini, maka diperlukan data yang lengkap dan akurat. Namun sampai saat ini data statistik perikanan yang tersedia masih sangat terbatas, baik jenis maupun ruang lingkungannya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data profil Pelabuhan Perikanan (PP) melalui pendekatan kuesioner PP. Data yang dikumpulkan mencakup identitas, karakteristik, kategori, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penjualan ikan di TPI dan selain TPI, pungutan retribusi, dan pendaratan perahu/kapal.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi Profil Pelabuhan Perikanan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik PP menurut berbagai kategori, keberadaan TPI di pelabuhan, penjualan ikan di TPI, penjualan ikan selain di TPI, pungutan retribusi di PP, dan pendaratan perahu/kapal di PP.

Manfaat yang dapat diambil dari publikasi ini, selain memperkaya informasi mengenai profil PP, juga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait kelautan dan kemaritiman di Indonesia dan bahan studi untuk perkembangan ilmu. Bagi Badan Pusat Statistik tentunya dapat dijadikan bahan evaluasi dan rujukan untuk kegiatan sensus atau survei lain yang terkait.

1.3. Sistematika Penulisan

Pada Bab Pendahuluan diutarakan secara singkat latar belakang dan tujuan penulisan publikasi yang akan mengantarkan pembaca pada pokok-pokok pembahasan lebih lanjut. Pada bab kedua diuraikan mengenai metodologi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pada bab ketiga, membahas mengenai profil Pelabuhan Perikanan di Indonesia dari Tahun 2013 sampai dengan 2015.

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menampilkan profil Pelabuhan Perikanan adalah kuesioner PP yang dikumpulkan setiap triwulan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pencacahan lengkap (*complete enumeration*) terhadap seluruh PP yang ada di Indonesia. Kuesioner PP yang dikumpulkan setiap triwulan oleh seluruh PP pada 22 provinsi di Indonesia. Keterangan mengenai karakteristik PP didapatkan dari kepala PP ataupun staf yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi PP.

2.3. Pengolahan Data

Proses pengolahan data meliputi tahap penerimaan dokumen (*receiving*) kuesioner PP, pengelompokan dokumen per provinsi (*batching*), pemeriksaan isian kuesioner (*editing*), pengkodean identitas dan karakteristik PP (*coding*), perekaman data pada komputer (*data entry*), pemeriksaan *database*, pengeluaran tabel publikasi (*run program*), pemeriksaan tabel publikasi, dan pembuatan draft publikasi. Pemeriksaan tabel hasil keluaran program dilakukan oleh petugas dengan melakukan pemeriksaan isian tabel, kewajaran isian, konsistensi antar variabel, antar triwulan, dan antar tahun.

2.4. Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang terdapat dalam publikasi ini antara lain :

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012).

Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas / tipe, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- c. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Publikasi ini hanya membahas profil dari Pelabuhan Perikanan dengan **kategori A, B, dan C**.

Kriteria teknis PPS terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangnya 60 GT;
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.

Kriteria operasional PPS terdiri dari:

1. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
2. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
3. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Kriteria teknis PPN terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangnya 30 GT;
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan

5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.

Kriteria operasional PPN terdiri dari:

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Kriteria teknis PPP terdiri dari:

1. Mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
4. Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
5. Memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

Kriteria operasional PPP terdiri dari:

1. Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
2. Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), adalah pasar yang biasanya terletak di dalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan /hasil laut, baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan di darat).

Perahu tak bermotor adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung.

Kapal motor adalah kapal yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak dan mesinnya diletakkan permanen di dalam kapal. Sebagian besar kapal motor di Indonesia terbuat dari kayu dan sebagian kecil terbuat dari besi.

Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) sebagai tenaga penggerak dan motornya diletakkan di luar baik di buritan maupun di sisi perahu. Motor tempel dapat dipasang pada jukung atau perahu papan.

<http://www.bps.go.id>

3

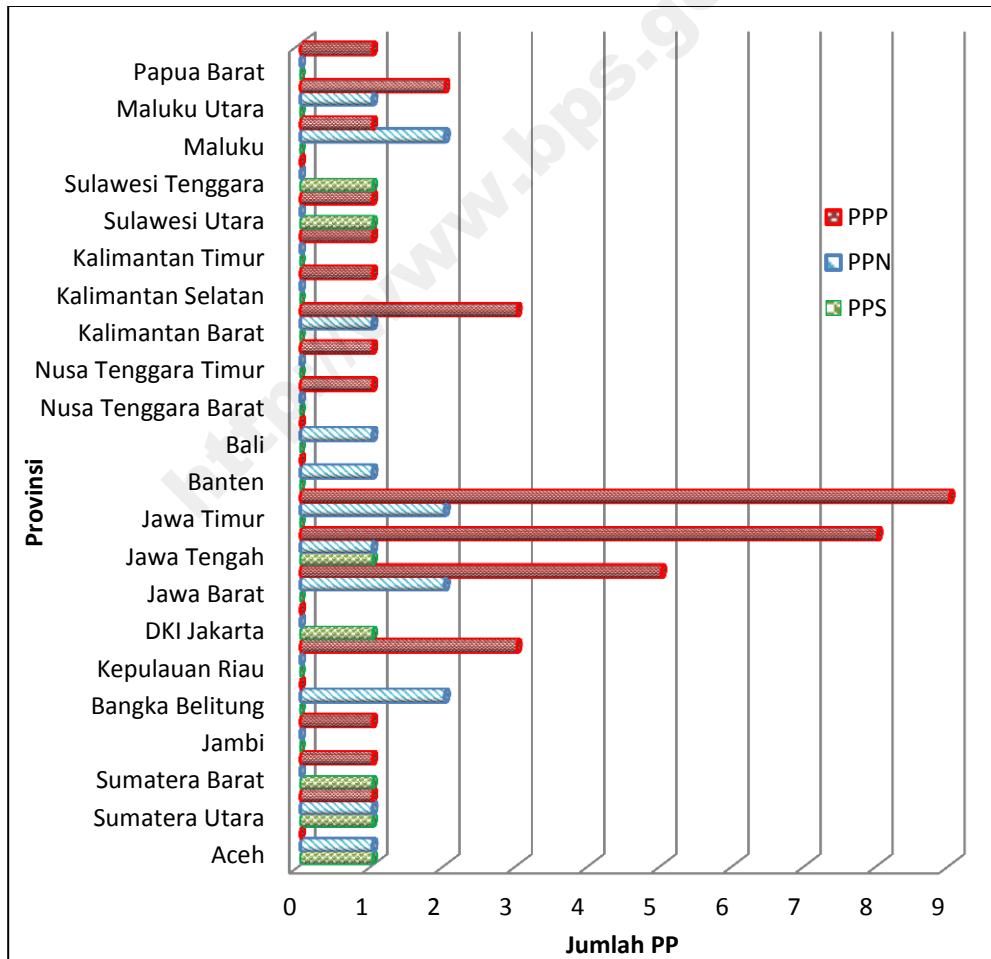
PROFIL PELABUHAN PERIKANAN

3.1. Pelabuhan Perikanan di Indonesia

Terdapat 61 Pelabuhan Perikanan yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia. Pelabuhan Perikanan Tipe A sebanyak 7 PPS, tipe B sebanyak 15 PPN, dan tipe C sebanyak 40 PPP.

Gambar 3.1.

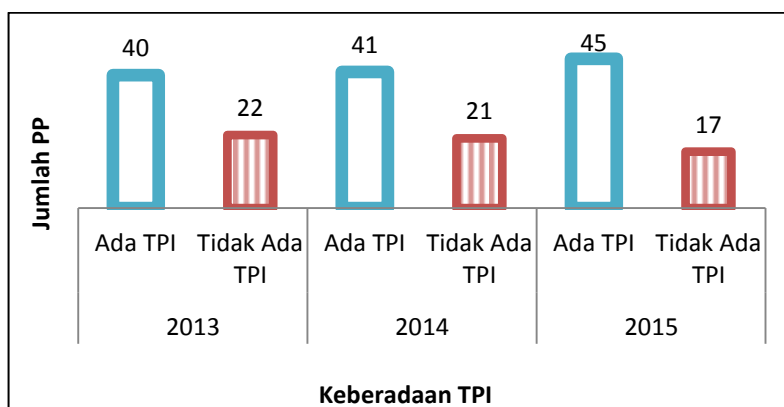
Jumlah PP Menurut Provinsi, 2013 - 2015



Dari Gambar 3.1. terlihat bahwa Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) / PP Tipe A terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) / PP Tipe B terletak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Maluku, dan Maluku Utara dengan jumlah terbanyak terdapat di Provinsi Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Maluku masing-masing sebanyak 2 buah PPN. Sedangkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) / PP Tipe C terletak di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat. Jumlah PPP terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 buah PPP, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing sebanyak 8 dan 5 buah PPP.

3.2. Keberadaan TPI di Pelabuhan Perikanan

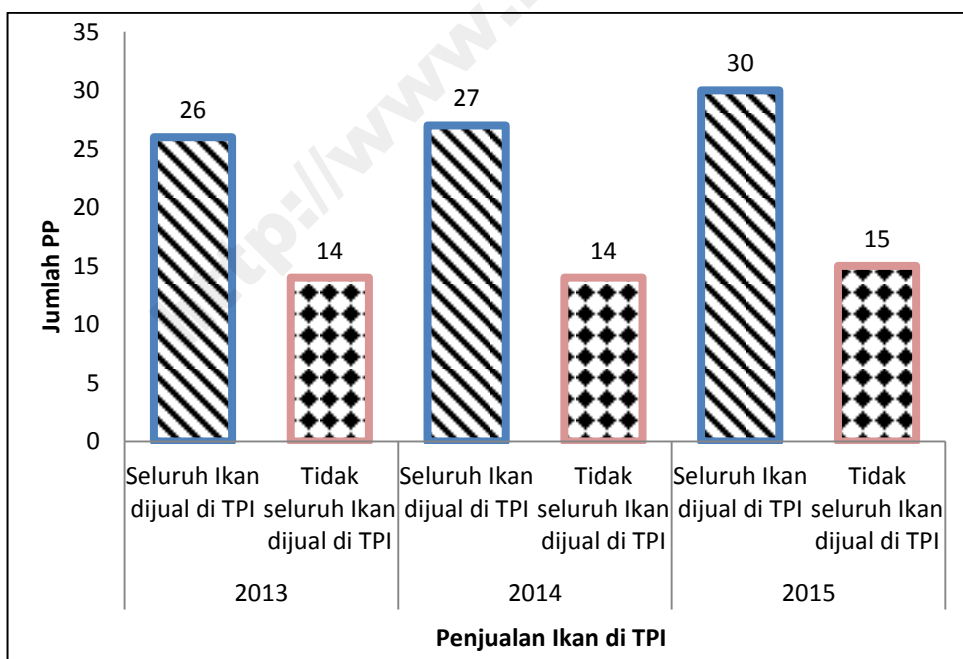
Gambar 3.2.
Jumlah PP Menurut Keberadaan TPI, 2013 – 2015



Keberadaan TPI di Pelabuhan Perikanan dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat terlihat pada Gambar 3.2. Terjadi peningkatan jumlah keberadaan TPI pada PP dari Tahun 2013 hingga 2015. Tahun 2013, terdapat sebanyak 40 PP yang memiliki TPI di pelabuhannya, Tahun 2014 menjadi 41 PP, dan pada Tahun 2015 menjadi 45 PP. Hal ini tentu saja diiringi dengan penurunan jumlah PP yang tidak memiliki TPI di pelabuhannya dari Tahun 2013 hingga 2015. Jumlah PP menurut provinsi dan keberadaan TPI dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

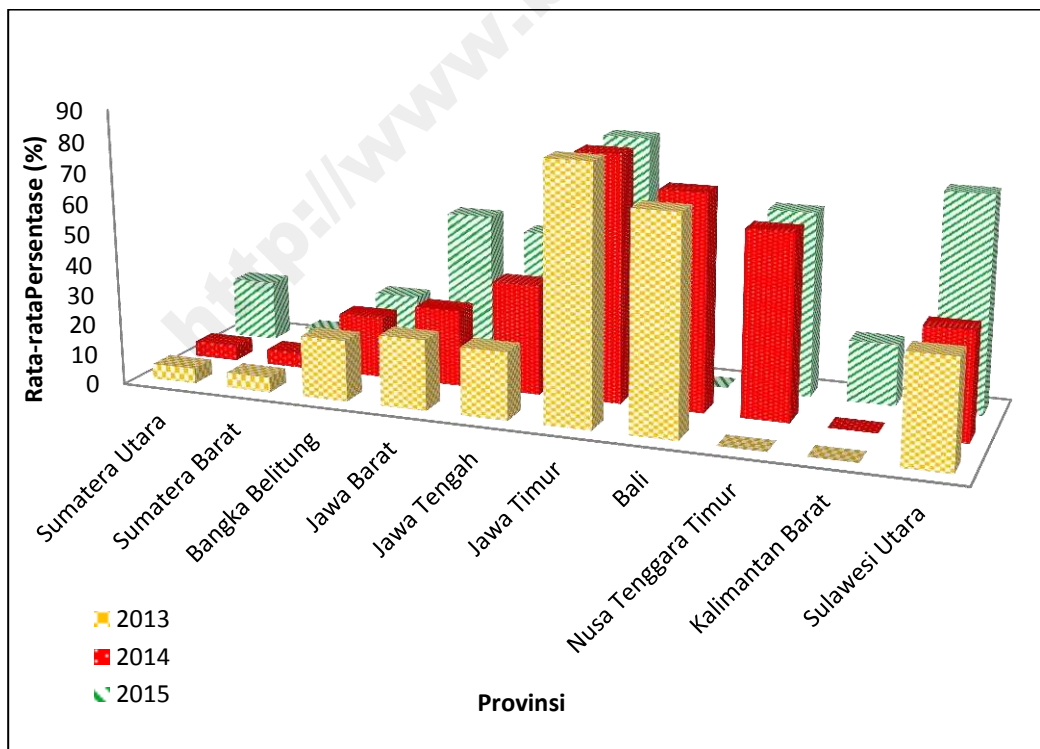
3.3. Penjualan Ikan pada TPI di Pelabuhan Perikanan

Gambar 3.3.
Jumlah PP yang Memiliki TPI Menurut Penjualan Ikan di TPI, 2013 – 2015



Dari sejumlah PP yang memiliki TPI di pelabuhannya, dapat dilihat kegiatan penjualan ikan di TPI pada pelabuhan tersebut. Gambar 3.3. memperlihatkan terjadinya peningkatan fungsi TPI di pelabuhan tersebut. Dimana, terjadi peningkatan jumlah ikan yang seluruhnya dijual di TPI pada pelabuhan dari Tahun 2013 hingga 2015. Tahun 2013 sebanyak 26 PP yang menjual seluruh ikannya di TPI pada pelabuhan, Tahun 2014 menjadi 27 PP, dan pada Tahun 2015 menjadi 30 PP. Jumlah PP yang memiliki TPI menurut provinsi dan penjualan ikan di TPI dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Gambar 3.4.
Rata-rata Persentase Penjualan Ikan di TPI yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI menurut Provinsi, 2013 - 2015

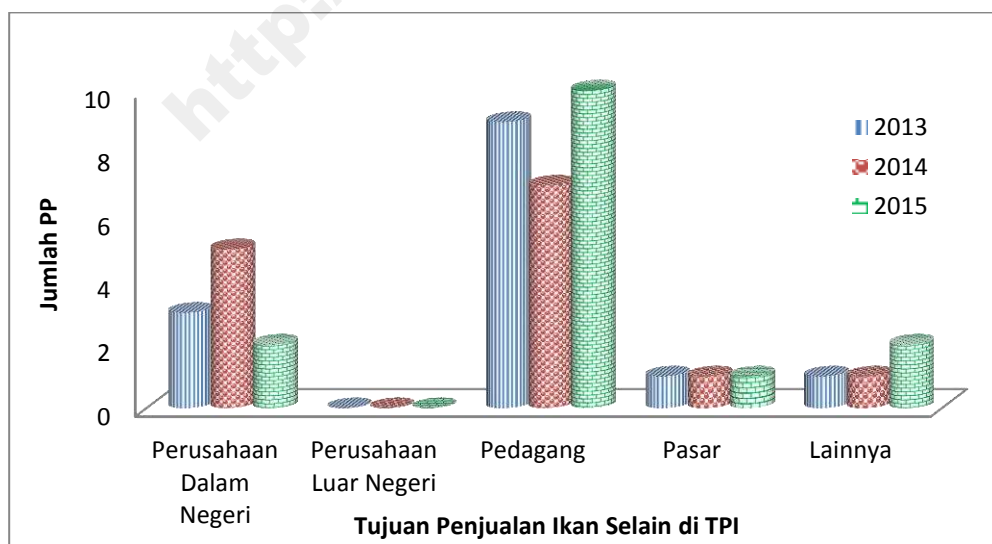


Selanjutnya dapat diketahui rata-rata persentase penjualan ikan di TPI pada masing-masing PP tersebut (Gambar 3.4). Rata-rata persentase terbesar penjualan ikan di TPI pada PP adalah di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 83 persen (Tahun 2013), 80 persen (Tahun 2014), dan 80 persen (Tahun 2015). Di Provinsi Bali memiliki rata-rata persentase penjualan ikan di TPI pada PP sebesar 70 persen untuk Tahun 2013 dan 2014. Rata-rata persentase penjualan ikan di TPI pada PP di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70 persen pada Tahun 2015.

3.4. Penjualan Ikan Selain di TPI

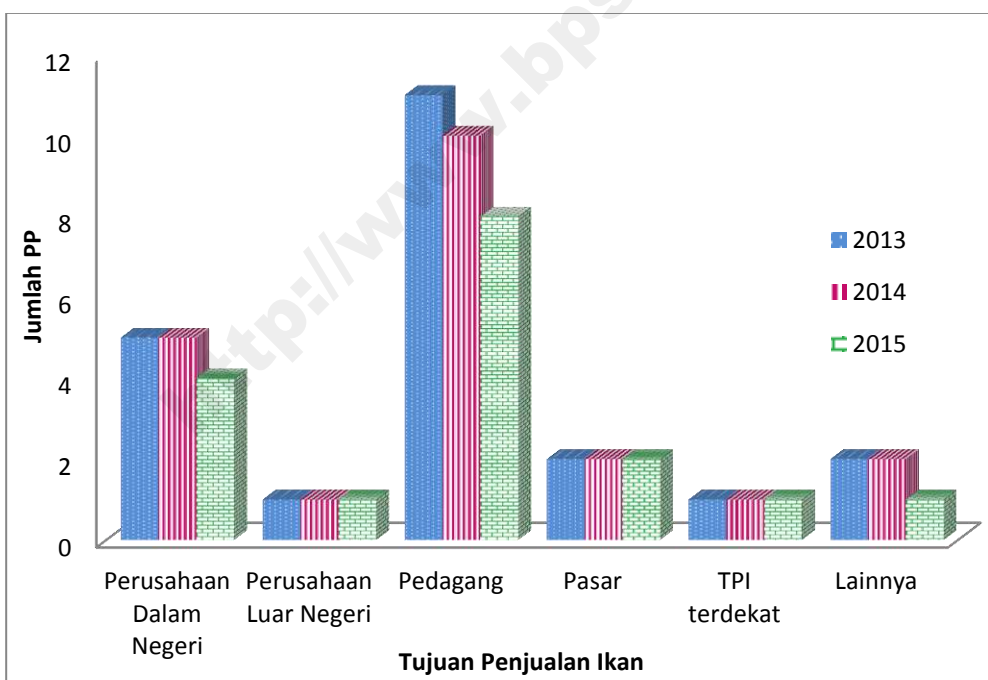
Tujuan penjualan ikan bagi PP yang tidak menjual seluruh ikannya di TPI sebagian besar adalah pada pedagang.

Gambar 3.5.
Jumlah PP Tipe A, B, dan C yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI Menurut Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI, 2013 - 2015



Dari Gambar 3.5. terlihat bahwa sebagian besar tujuan penjualan ikan bagi PP yang tidak menjual seluruh ikannya di TPI adalah pada pedagang, sebanyak 9 PP (Tahun 2013), 7 PP (Tahun 2014), dan 10 PP (Tahun 2015). Selain itu, sebanyak 3 PP (Tahun 2013), 5 PP (Tahun 2014), dan 2 PP (Tahun 2015) menjual ikannya pada perusahaan dalam negeri. Sedangkan PP lainnya menjual ikan pada pasar dan lainnya. Tabel lengkap jumlah PP yang tidak menjual seluruh ikan di TPI menurut provinsi dan tujuan penjualan ikan selain di TPI dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.

Gambar 3.6.
Jumlah PP Tipe A, B, dan C yang Tidak Memiliki TPI Menurut Tujuan Penjualan Ikan, 2013 - 2015

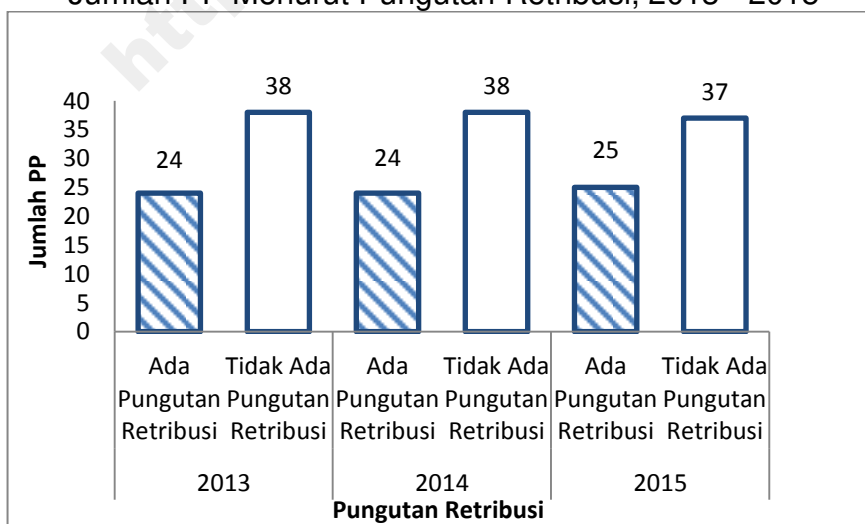


Tujuan penjualan ikan bagi PP yang tidak memiliki TPI juga paling banyak pada pedagang, yaitu sebanyak 11 PP (Tahun 2013), 10 PP (Tahun 2014), dan 8 PP (Tahun 2015). Selanjutnya pada perusahaan dalam negeri sebanyak 5 PP (Tahun 2013 dan 2014) dan 4 PP (Tahun 2015). Sedangkan PP lainnya menjual ikan pada pasar, TPI terdekat, dan lainnya. (Gambar 3.6.). Tabel lengkap jumlah PP yang tidak memiliki TPI menurut provinsi dan tujuan penjualan ikan dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.

3.5. Pungutan Retribusi

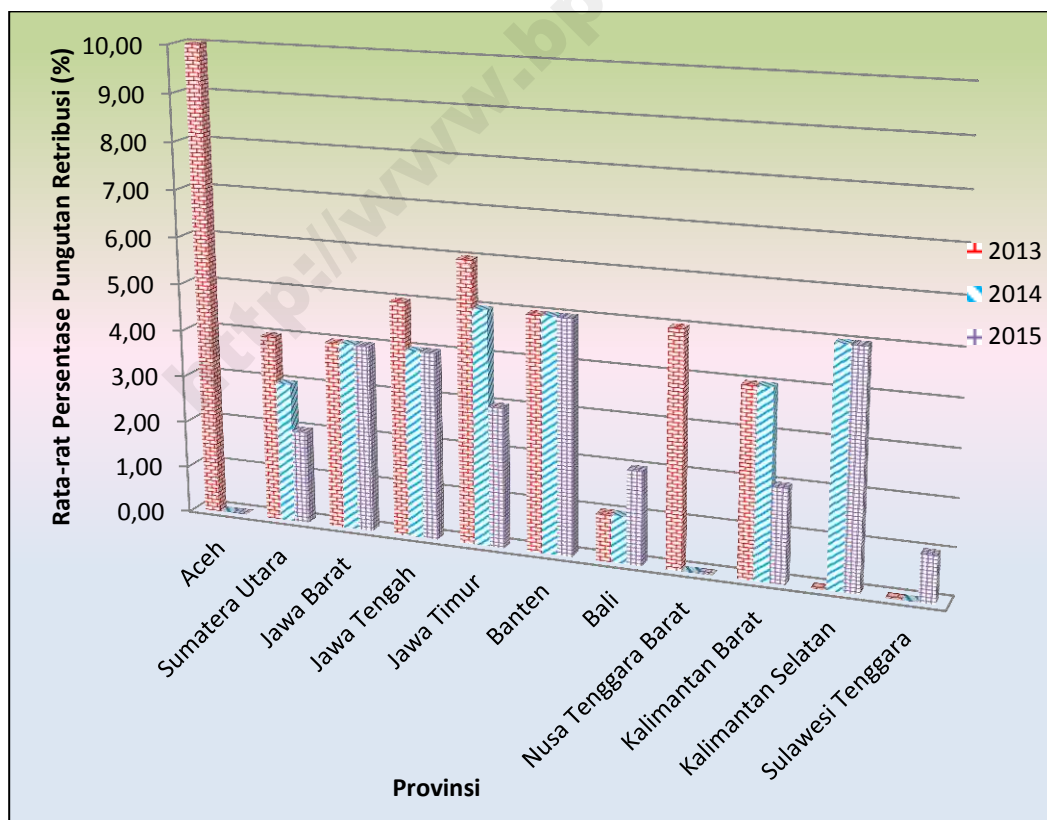
Terdapat sebanyak 24 PP (Tahun 2013 dan 2014) dan 25 PP (Tahun 2015) yang dipungut retribusi dari semua hasil tangkapan yang diperoleh. Sedangkan PP yang tidak dipungut retribusi sebanyak 38 PP (Tahun 2013 dan 2014) dan 37 PP (Tahun 2015) (Gambar 3.7.).

Gambar 3.7.
Jumlah PP Menurut Pungutan Retribusi, 2013 - 2015



Tabel jumlah PP menurut provinsi dan pungutan retribusi dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 7. Rata-rata persentase pungutan retribusi dapat dilihat pada Gambar 3.8. Rata-rata persentase pungutan retribusi yang terbesar adalah di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 10 persen pada Tahun 2013. Rata-rata persentase pungutan retribusi yang terbesar kedua adalah di Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 6 persen pada Tahun 2013. Rata-rata persentase pungutan retribusi di Provinsi Banten sebesar 5 persen dari Tahun 2013 hingga 2015.

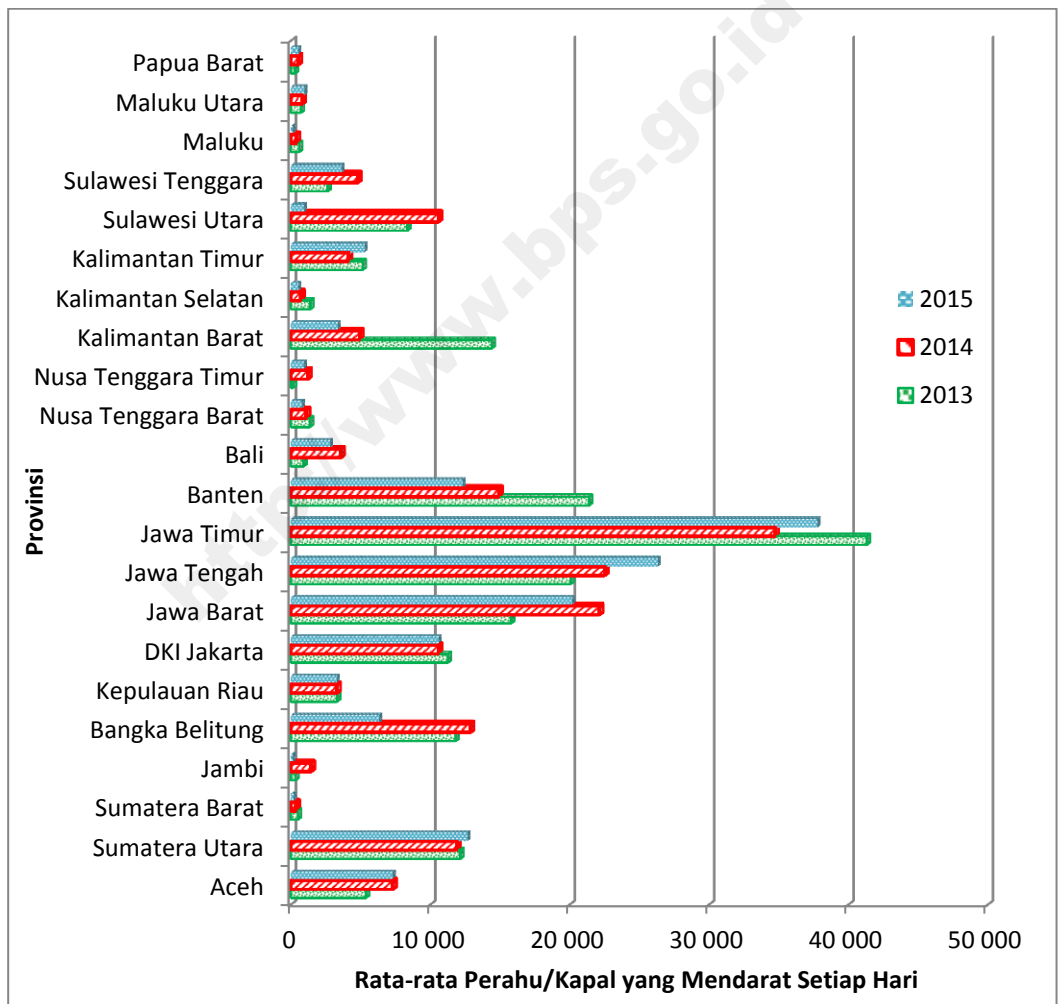
Gambar 3.8.
Rata-rata Persentase Pungutan Retribusi pada PP Menurut Provinsi, 2013 – 2015



3.6. Pendaratan Perahu/Kapal di Pelabuhan Perikanan

Rata-rata perahu/kapal yang mendarat setiap hari di pelabuhan perikanan menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9.
Rata-rata Perahu/Kapal yang Mendarat Setiap Hari Menurut Provinsi, 2013 – 2015



Rata-rata perahu/kapal terbanyak yang mendarat setiap hari di Pelabuhan Perikanan adalah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 41.314 buah perahu/kapal pada Tahun 2013, 34.734 buah pada Tahun 2014, dan sebanyak 37.786 buah pada Tahun 2015. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak 15.797 buah perahu/kapal pada Tahun 2013, meningkat menjadi 22.135 buah pada Tahun 2014, dan sebanyak 20.170 buah pada Tahun 2015. Rata-rata perahu/kapal paling sedikit, yang mendarat setiap hari di Pelabuhan Perikanan adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 162 buah perahu/kapal pada Tahun 2013, selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 361 buah perahu/kapal pada Tahun 2014, dan di Provinsi Maluku sebanyak 116 buah perahu/kapal pada Tahun 2015. Tabel rata-rata perahu/kapal yang mendarat setiap hari menurut provinsi dan bulan dari Tahun 2013 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 9.

TABEL - TABEL

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Tabel 1.
Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Provinsi dan Kategori,
2013 - 2015

Provinsi	2013 - 2015			Jumlah
	Tipe A :	Tipe B :	Tipe C :	
	Pelabuhan Perikanan Samudera	Pelabuhan Perikanan Nusantara	Pelabuhan Perikanan Pantai	
	(PPS)	(PPN)	(PPP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1	1	-	2
Sumatera Utara	1	1	1	3
Sumatera Barat	1	-	1	2
Jambi	-	-	1	1
Bangka Belitung	-	2	-	2
Kepulauan Riau	-	-	3	3
DKI Jakarta	1	-	-	1
Jawa Barat	-	2	5	7
Jawa Tengah	1	1	8	10
Jawa Timur	-	2	9	11
Banten	-	1	-	1
Bali	-	1	-	1
Nusa Tenggara Barat	-	-	1	1
Nusa Tenggara Timur	-	-	1	1
Kalimantan Barat	-	1	3	4
Kalimantan Selatan	-	-	1	1
Kalimantan Timur	-	-	1	1
Sulawesi Utara	1	-	1	2
Sulawesi Tenggara	1	-	-	1
Maluku	-	2	1	3
Maluku Utara	-	1	2	3
Papua Barat	-	-	1	1
Indonesia	7	15	40	62

Tabel 2.
Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Provinsi dan Keberadaan TPI,
2013 - 2015

Provinsi	Keberadaan TPI					
	2013			2014		
	Ada TPI	Tidak Ada TPI	Jumlah	Ada TPI	Tidak Ada TPI	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2	-	2	2	-	2
Sumatera Utara	1	2	3	1	2	3
Sumatera Barat	1	1	2	1	1	2
Jambi	-	1	1	-	1	1
Bangka Belitung	1	1	2	1	1	2
Kepulauan Riau	-	3	3	-	3	3
DKI Jakarta	-	1	1	-	1	1
Jawa Barat	7	-	7	7	-	7
Jawa Tengah	9	1	10	9	1	10
Jawa Timur	9	2	11	9	2	11
Banten	1	-	1	1	-	1
Bali	1	-	1	1	-	1
Nusa Tenggara Barat	1	-	1	1	-	1
Nusa Tenggara Timur	1	-	1	1	-	1
Kalimantan Barat	2	2	4	2	2	4
Kalimantan Selatan	-	1	1	1	-	1
Kalimantan Timur	-	1	1	-	1	1
Sulawesi Utara	1	1	2	1	1	2
Sulawesi Tenggara	1	-	1	1	-	1
Maluku	1	2	3	1	2	3
Maluku Utara	1	2	3	1	2	3
Papua Barat	-	1	1	-	1	1
Indonesia	40	22	62	41	21	62

Lanjutan Tabel 2.

Provinsi	Keberadaan TPI		
	2015		
	Ada TPI	Tidak Ada TPI	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2	-	2
Sumatera Utara	2	1	3
Sumatera Barat	1	1	2
Jambi	-	1	1
Bangka Belitung	1	1	2
Kepulauan Riau	-	3	3
DKI Jakarta	-	1	1
Jawa Barat	7	-	7
Jawa Tengah	9	1	10
Jawa Timur	9	2	11
Banten	1	-	1
Bali	1	-	1
Nusa Tenggara Barat	1	-	1
Nusa Tenggara Timur	1	-	1
Kalimantan Barat	4	-	4
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	-	1	1
Sulawesi Utara	1	1	2
Sulawesi Tenggara	1	-	1
Maluku	2	1	3
Maluku Utara	1	2	3
Papua Barat	-	1	1
Indonesia	45	17	62

Tabel 3.
Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Memiliki TPI Menurut Provinsi dan
Penjualan Ikan di TPI, 2013 - 2015

Provinsi	Penjualan Ikan di TPI			
	2013		2014	
	Seluruh ikan dijual di TPI	Tidak seluruh ikan dijual di TPI	Seluruh ikan dijual di TPI	Tidak seluruh ikan dijual di TPI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2	-	2	-
Sumatera Utara	-	1	-	1
Sumatera Barat	-	1	-	1
Jambi	-	-	-	-
Bangka Belitung	-	1	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	5	2	5	2
Jawa Tengah	6	3	6	3
Jawa Timur	5	4	6	3
Banten	1	-	1	-
Bali	-	1	-	1
Nusa Tenggara Barat	1	-	1	-
Nusa Tenggara Timur	1	-	-	1
Kalimantan Barat	2	-	2	-
Kalimantan Selatan	-	-	1	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	1	-	1
Sulawesi Tenggara	1	-	1	-
Maluku	1	-	1	-
Maluku Utara	1	-	1	-
Papua Barat	-	-	-	-
Indonesia	26	14	27	14

Lanjutan Tabel 3.

Provinsi	Penjualan Ikan di TPI	
	2015	
	Seluruh Ikan dijual di TPI	Tidak seluruh Ikan dijual di TPI
(1)	(6)	(7)
Aceh	2	-
Sumatera Utara	1	1
Sumatera Barat	-	1
Jambi	-	-
Bangka Belitung	-	1
Kepulauan Riau	-	-
DKI Jakarta	-	-
Jawa Barat	5	2
Jawa Tengah	5	4
Jawa Timur	6	3
Banten	1	-
Bali	1	-
Nusa Tenggara Barat	1	-
Nusa Tenggara Timur	-	1
Kalimantan Barat	3	1
Kalimantan Selatan	1	-
Kalimantan Timur	-	-
Sulawesi Utara	-	1
Sulawesi Tenggara	1	-
Maluku	2	-
Maluku Utara	1	-
Papua Barat	-	-
Indonesia	30	15

Tabel 4.
Rata-rata Persentase Penjualan Ikan di TPI yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI, 2013 - 2015

Provinsi	Persentase Penjualan Ikan di TPI (%)		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	-	-
Sumatera Utara	5,00	5,00	20,00
Sumatera Barat	5,00	5,00	5,00
Jambi	-	-	-
Bangka Belitung	20,00	20,00	20,00
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	23,00	25,00	50,00
Jawa Tengah	22,00	36,00	46,00
Jawa Timur	83,00	80,00	80,00
Banten	-	-	-
Bali	70,00	70,00	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	60,00	60,00
Kalimantan Barat	-	-	20,00
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-
Sulawesi Utara	35,00	35,00	70,00
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Indonesia	41,00	42,00	48,00

Tabel 5.
Jumlah PP yang Tidak Menjual Seluruh Ikan di TPI Menurut Provinsi dan Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI, 2013 - 2015

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI					
	2013					
	Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Luar Negeri	Pedagang	Pasar	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	-	-	-	1
Sumatera Barat	-	-	1	-	-	1
Jambi	-	-	-	-	-	-
Bangka Belitung	-	-	1	-	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	1	-	1	2
Jawa Tengah	-	-	3	-	-	3
Jawa Timur	-	-	3	1	-	4
Banten	-	-	-	-	-	-
Bali	1	-	-	-	-	1
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Indonesia	3	-	9	1	1	14

Lanjutan Tabel 5.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI					
	2014					
	Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Luar Negeri	Pedagang	Pasar	Lainnya	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	-	-	-	1
Sumatera Barat	-	-	1	-	-	1
Jambi	-	-	-	-	-	-
Bangka Belitung	-	-	1	-	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	1	-	1	2
Jawa Tengah	1	-	2	-	-	3
Jawa Timur	-	-	2	1	-	3
Banten	-	-	-	-	-	-
Bali	1	-	-	-	-	1
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1	-	-	-	-	1
Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Indonesia	5	-	7	1	1	14

Lanjutan Tabel 5.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan Selain di TPI					
	2015					
	Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Luar Negeri	Pedagang	Pasar	Lainnya	Jumlah
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	-	-	-	1
Sumatera Barat	-	-	1	-	-	1
Jambi	-	-	-	-	-	-
Bangka Belitung	-	-	-	-	1	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	-	1	-	1	2
Jawa Tengah	-	-	4	-	-	4
Jawa Timur	-	-	2	1	-	3
Banten	-	-	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1	-	-	-	-	1
Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	1
Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	1	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Indonesia	2	-	10	1	2	15

Tabel 6.
Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Tidak Memiliki TPI Menurut
Provinsi dan Tujuan Penjualan Ikan, 2013 - 2015

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan		
	2013		
	Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Luar Negeri	Pedagang
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	1
Sumatera Barat	-	1	-
Jambi	1	-	-
Bangka Belitung	1	-	-
Kepulauan Riau	-	-	3
DKI Jakarta	-	-	1
Jawa Barat	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	-
Jawa Timur	-	-	1
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	1
Kalimantan Selatan	-	-	1
Kalimantan Timur	-	-	1
Sulawesi Utara	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Maluku	1	-	-
Maluku Utara	-	-	2
Papua Barat	1	-	-
Indonesia	5	1	11

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan			
	2013			
	Pasar	TPI terdekat	Lainnya	Jumlah
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	-	-	-	-
Sumatera Utara	-	-	-	2
Sumatera Barat	-	-	-	1
Jambi	-	-	-	1
Bangka Belitung	-	-	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	3
DKI Jakarta	-	-	-	1
Jawa Barat	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	1	-	1
Jawa Timur	1	-	-	2
Banten	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	1	2
Kalimantan Selatan	-	-	-	1
Kalimantan Timur	-	-	-	1
Sulawesi Utara	1	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Maluku	-	-	1	2
Maluku Utara	-	-	-	2
Papua Barat	-	-	-	1
Indonesia	2	1	2	22

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan		
	2014		
	Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Luar Negeri	Pedagang
(1)	(9)	(10)	(11)
Aceh	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	1
Sumatera Barat	-	1	-
Jambi	-	-	1
Bangka Belitung	1	-	-
Kepulauan Riau	-	-	3
DKI Jakarta	-	-	1
Jawa Barat	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	-
Jawa Timur	-	-	1
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	1
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	1	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Maluku	1	-	-
Maluku Utara	-	-	2
Papua Barat	1	-	-
Indonesia	5	1	10

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan			
	2014			
	Pasar	TPI terdekat	Lainnya	Jumlah
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aceh	-	-	-	-
Sumatera Utara	-	-	-	2
Sumatera Barat	-	-	-	1
Jambi	-	-	-	1
Bangka Belitung	-	-	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	3
DKI Jakarta	-	-	-	1
Jawa Barat	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	1	-	1
Jawa Timur	1	-	-	2
Banten	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	1	2
Kalimantan Selatan	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	1
Sulawesi Utara	1	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Maluku	-	-	1	2
Maluku Utara	-	-	-	2
Papua Barat	-	-	-	1
Indonesia	2	1	2	21

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan		
	2015		
	Perusahaan Dalam Negeri	Perusahaan Luar Negeri	Pedagang
(1)	(16)	(17)	(18)
Aceh	-	-	-
Sumatera Utara	1	-	-
Sumatera Barat	-	1	-
Jambi	-	-	1
Bangka Belitung	1	-	-
Kepulauan Riau	-	-	3
DKI Jakarta	-	-	1
Jawa Barat	-	-	-
Jawa Tengah	-	-	-
Jawa Timur	-	-	1
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	1	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	-
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	2
Papua Barat	1	-	-
Indonesia	4	1	8

Lanjutan Tabel 6.

Provinsi	Tujuan Penjualan Ikan			
	2015			
	Pasar	TPI terdekat	Lainnya	Jumlah
(1)	(19)	(20)	(21)	(22)
Aceh	-	-	-	-
Sumatera Utara	-	-	-	1
Sumatera Barat	-	-	-	1
Jambi	-	-	-	1
Bangka Belitung	-	-	-	1
Kepulauan Riau	-	-	-	3
DKI Jakarta	-	-	-	1
Jawa Barat	-	-	-	-
Jawa Tengah	-	1	-	1
Jawa Timur	1	-	-	2
Banten	-	-	-	-
Bali	-	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
Kalimantan Barat	-	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-	-
Kalimantan Timur	-	-	-	1
Sulawesi Utara	1	-	-	1
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
Maluku	-	-	1	1
Maluku Utara	-	-	-	2
Papua Barat	-	-	-	1
Indonesia	2	1	1	17

Tabel 7.
Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Provinsi dan Pungutan Retribusi,
2013 - 2015

Provinsi	Pungutan Retribusi					
	2013		2014		2015	
	Ada Pungutan Retribusi	Tidak Ada Pungutan Retribusi	Ada Pungutan Retribusi	Tidak Ada Pungutan Retribusi	Ada Pungutan Retribusi	Tidak Ada Pungutan Retribusi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1	1	-	2	-	2
Sumatera Utara	1	2	1	2	1	2
Sumatera Barat	-	2	-	2	-	2
Jambi	-	1	-	1	-	1
Bangka						
Belitung	-	2	-	2	-	2
Kepulauan Riau	-	3	-	3	-	3
DKI Jakarta	-	1	-	1	-	1
Jawa Barat	4	3	5	2	6	1
Jawa Tengah	8	2	8	2	7	3
Jawa Timur	6	5	6	5	6	5
Banten	1	-	1	-	1	-
Bali	1	-	1	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	1	-	-	1	-	1
Nusa Tenggara Timur	-	1	-	1	-	1
Kalimantan Barat	1	3	1	3	1	3
Kalimantan Selatan	-	1	1	-	1	-
Kalimantan Timur	-	1	-	1	-	1
Sulawesi Utara	-	2	-	2	-	2
Sulawesi Tenggara	-	1	-	1	1	-
Maluku	-	3	-	3	-	3
Maluku Utara	-	3	-	3	-	3
Papua Barat	-	1	-	1	-	1
Indonesia	24	38	24	38	25	37

Tabel 8.
Rata-rata Persentase Pungutan Retribusi pada PP Menurut Provinsi,
2013 - 2015

Provinsi	Persentase Pungutan Retribusi (%)		
	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10.00	-	-
Sumatera Utara	4.00	3.00	2.00
Sumatera Barat	-	-	-
Jambi	-	-	-
Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	4.00	4.00	4.00
Jawa Tengah	5.00	4.00	4.00
Jawa Timur	6.00	5.00	3.00
Banten	5.00	5.00	5.00
Bali	1.00	1.00	2.00
Nusa Tenggara Barat	5.00	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	-
Kalimantan Barat	4.00	4.00	2.00
Kalimantan Selatan	-	5.00	5.00
Kalimantan Timur	-	-	-
Sulawesi Utara	-	-	-
Sulawesi Tenggara	-	-	1.00
Maluku	-	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Indonesia	5.00	4.00	4.00

Tabel 9.
Rata-rata perahu/Kapal yang Mendarat Setiap Hari Menurut Provinsi dan Bulan, 2013 - 2015

Provinsi	2013						
	Januar i	Februar i	Maret	April	Mei	Juni	Juli
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	447	448	448	449	448	447	448
Sumatera Utara	1 098	928	899	989	995	1 012	958
Sumatera Barat	44	49	68	37	30	38	42
Jambi	29	27	29	29	27	29	29
Bangka Belitung	1032	1272	1098	1058	1263	1093	1054
Kepulauan Riau	116	238	385	361	334	344	269
DKI Jakarta	970	1059	971	970	1059	971	1030
Jawa Barat	1 334	1 033	1 357	1 211	1 228	1 130	1 642
Jawa Tengah	1 466	1 815	1 833	1 499	1 615	1 804	1 930
Jawa Timur	1 950	1 786	2 498	2 216	2 261	2 284	3 463
Banten	1 804	1 782	1 813	1 700	1 802	1 816	1 703
Bali	21	62	73	23	21	15	30
Nusa Tenggara Barat	25	10	26	216	252	244	88
Nusa Tenggara Timur	12	12	12	14	14	14	14
Kalimantan Barat	1 033	1 009	1 007	898	875	873	1 399
Kalimantan Selatan	73	105	146	146	131	132	107
Kalimantan Timur	330	251	315	367	394	412	435
Sulawesi Utara	22	29	33	970	1 059	971	1 030
Sulawesi Tenggara	323	435	441	87	65	54	442
Maluku	29	26	37	41	24	31	62
Maluku Utara	42	49	54	62	63	55	61
Papua Barat	27	25	29	28	27	27	26
Indonesia	12 227	12 450	13 572	3 371	3 987	3 796	6 262

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	2013				
	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	448	448	447	448	449
Sumatera Utara	1 184	981	1 138	1 016	970
Sumatera Barat	36	40	43	38	55
Jambi	27	29	24	24	19
Bangka Belitung	599	980	983	917	477
Kepulauan Riau	226	268	269	226	268
DKI Jakarta	780	933	788	935	812
Jawa Barat	1 410	1 393	1 365	1 402	1 292
Jawa Tengah	1 263	1 763	1 797	1 807	1 479
Jawa Timur	3 674	5 283	5 734	6 019	4 146
Banten	1 647	1 611	1 649	1 909	2 147
Bali	177	422	30	14	17
Nusa Tenggara Barat	82	96	119	108	101
Nusa Tenggara Timur	14	14	14	14	14
Kalimantan Barat	1 419	1 551	1 582	1 509	1 244
Kalimantan Selatan	45	96	148	150	122
Kalimantan Timur	419	570	536	546	574
Sulawesi Utara	780	933	788	935	812
Sulawesi Tenggara	369	431	-	-	-
Maluku	62	68	66	84	66
Maluku Utara	70	72	63	66	68
Papua Barat	15	31	26	15	31
Indonesia	14 746	18 013	17 609	18 182	15 163

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	2014					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	452	437	462	612	603	633
Sumatera Utara	1 072	902	868	974	974	1 003
Sumatera Barat	21	19	31	37	40	32
Jambi	32	35	37	341	395	380
Bangka Belitung	592	502	693	2115	2335	1805
Kepulauan Riau	116	238	385	361	334	344
DKI Jakarta	650	713	926	928	1067	1009
Jawa Barat	2 004	1 737	1 921	1639	1715	1 655
Jawa Tengah	1 011	1 210	2 659	1 637	2 475	2 226
Jawa Timur	1 950	1 745	2 529	1 395	1 489	1 592
Banten	2 147	2 147	2 147	1 135	1 121	1 131
Bali	247	340	205	247	340	205
Nusa Tenggara Barat	15	10	39	96	166	87
Nusa Tenggara Timur	113	96	76	113	96	76
Kalimantan Barat	227	202	198	97	96	96
Kalimantan Selatan	75	92	150	65	50	45
Kalimantan Timur	43	41	41	414	436	456
Sulawesi Utara	650	713	926	928	1 067	1 009
Sulawesi Tenggara	620	591	573	634	574	514
Maluku	64	64	84	17	26	11
Maluku Utara	88	91	90	67	59	25
Papua Barat	66	63	85	50	41	26
Indonesia	12 255	11 988	15 125	13 902	15 499	14 360

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	2014					
	Juli	Agustus	September	Oktober	Novembe r	Desembe r
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	596	617	687	708	802	705
Sumatera Utara	937	1 152	963	1 114	995	946
Sumatera Barat	27	26	27	31	41	29
Jambi	57	51	57	27	24	19
Bangka Belitung	912	1013	1090	673	756	396
Kepulauan Riau	269	226	268	269	226	268
DKI Jakarta	878	785	923	938	989	775
Jawa Barat	2 095	1 895	1 940	1 803	1 871	1 860
Jawa Tengah	1 561	1 995	2 115	2 095	1 975	1 559
Jawa Timur	2 340	2 840	4 269	5 135	5 463	3 987
Banten	695	843	807	770	925	1 050
Bali	247	340	205	431	395	381
Nusa Tenggara Barat	78	63	80	201	186	87
Nusa Tenggara Timur	51	76	129	167	140	89
Kalimantan Barat	603	644	772	787	738	482
Kalimantan Selatan	50	35	30	50	35	30
Kalimantan Timur	452	447	416	427	499	462
Sulawesi Utara	878	785	923	938	989	775
Sulawesi Tenggara	294	489	454	17	16	23
Maluku	20	16	12	26	11	45
Maluku Utara	53	58	51	58	80	81
Papua Barat	5	13	22	52	55	55
Indonesia	13 098	14 409	16 240	16 717	17 211	14 104

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	2015						
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
(1)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
Aceh	452	437	462	612	603	633	596
Sumatera Utara	1 111	909	1 102	1 111	1 157	1 154	1 010
Sumatera Barat	13	11	21	13	11	21	13
Jambi	11	22	12	11	10	12	5
Bangka Belitung	363	415	530	646	814	648	489
Kepulauan Riau	116	238	385	361	334	344	269
DKI Jakarta	650	713	926	928	1067	1009	878
Jawa Barat	2 249	1 983	1 985	1 571	1 656	1 589	1 677
Jawa Tengah	1 102	1 639	2 513	3 932	1 717	2 766	1 389
Jawa Timur	2 089	2 185	2 414	2 738	2 756	3 211	2 992
Banten	474	1 228	1 698	1 394	1 254	1 039	767
Bali	182	392	421	320	72	73	106
Nusa Tenggara Barat	18	13	52	18	13	52	119
Nusa Tenggara Timur	101	78	67	40	55	61	88
Kalimantan Barat	139	123	187	180	152	147	280
Kalimantan Selatan	30	28	45	30	47	48	26
Kalimantan Timur	450	440	459	419	418	413	344
Sulawesi Utara	35	47	44	79	83	101	79
Sulawesi Tenggara	489	425	527	269	252	199	235
Maluku	3	2	2	1	1	1	4
Maluku Utara	70	64	22	73	68	71	72
Papua Barat	66	63	85	50	41	26	5
Indonesia	10 213	11 455	3 959	4 796	2 581	3 618	11 443

Lanjutan Tabel 9.

Provinsi	2015				
	Agustus	September	Oktober	November	Desember
(1)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
Aceh	617	687	708	802	705
Sumatera Utara	1 061	966	1 103	1 013	967
Sumatera Barat	11	21	13	11	21
Jambi	7	3	16	16	16
Bangka Belitung	590	547	494	470	336
Kepulauan Riau	226	268	269	226	268
DKI Jakarta	785	923	938	989	775
Jawa Barat	1 489	1 533	1 526	1 589	1 323
Jawa Tengah	1 594	2 449	1 539	3 267	2 414
Jawa Timur	2 893	3 264	4 403	5 417	3 424
Banten	990	864	767	990	864
Bali	175	230	319	357	153
Nusa Tenggara Barat	117	122	112	92	46
Nusa Tenggara Timur	87	81	88	87	81
Kalimantan Barat	418	473	434	459	361
Kalimantan Selatan	30	35	90	72	63
Kalimantan Timur	440	466	448	492	476
Sulawesi Utara	83	101	79	83	101
Sulawesi Tenggara	271	287	216	220	224
Maluku	4	11	47	31	9
Maluku Utara	122	155	126	80	51
Papua Barat	13	22	52	55	55
Indonesia	12 023	13 508	13 787	16 818	12 733

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.kps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



DAFTAR - PP

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**LAPORAN TRIWULAN
PELABUHAN PERIKANAN (PP)**

RAHASIA

BLOK I. KETERANGAN PELABUHAN PERIKANAN

1. Provinsi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Kabupaten / Kota *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Kecamatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Desa / Kelurahan *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Data yang Dilaporkan	Triwulan Tahun	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6. Nomor Urut PP	Diisi oleh BPS	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7. Nama Lengkap Pelabuhan Perikanan :

8. Alamat Lengkap Pelabuhan Perikanan :

..... Kode Pos

Telepon () Fax. () E-mail :

9. Kategori Pelabuhan Perikanan :

PPS	-1	PPN	-2	PPP	-3	<input type="checkbox"/>
-----	----	-----	----	-----	----	--------------------------

10. Apakah di pelabuhan ini terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ?

Ada	-1 (Nama	Tidak ada	-2	(langsung ke R.12)	<input type="checkbox"/>
-----	----------------	-----------	----	---------------------------	--------------------------

11. Jika ada TPI (Rincian 10 berkode 1) :

a. Apakah seluruh ikan hasil tangkapan dijual/dicatat di TPI tersebut ?

Ya	- 1 (langsung ke R.11c)	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------------	-------	----	--------------------------

b. Jika tidak seluruh ikan dijual/dicatat di TPI (Rincian 11.a. berkode 2) :

(1). Berapa persen ikan yang dijual/dicatat di TPI terhadap seluruh ikan hasil tangkapan ?

(2). Kemana ikan yang dijual di luar TPI ?

Perusahaan dalam negeri	-1	Pedagang	-3	Lainnya (.....)	-5	<input type="checkbox"/>
Perusahaan luar negeri	-2	Pasar	-4			

c. Apakah petugas pencatat produksi di PP dengan TPI sama ?

Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>
----	----	-------	----	--------------------------

d. Apakah pencatatan produksi ikan yang dilakukan oleh petugas PP (Pelabuhan Perikanan) sudah termasuk ikan yang dijual melalui TPI ?

Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>
----	----	-------	----	--------------------------

12. Jika tidak ada TPI (Rincian 10 berkode 2), kemana biasanya ikan dijual ?

Perusahaan dalam negeri	-1	Pedagang	-3	TPI terdekat	-5	<input type="checkbox"/>
Perusahaan luar negeri	-2	Pasar	-4	Lainnya (.....)	-6	

13. Apakah dipungut retribusi dari semua hasil tangkapan yang diperoleh ?

Ya	-1	Tidak	-2	<input type="checkbox"/>
----	----	-------	----	--------------------------

14. Jika R.13 berkode 1, berapa persen pungutan retribusi terhadap nilai hasil tangkapan ?

*) Coret yang tidak sesuai

Tujuan : Memperoleh data statistik yang akurat dan tepat waktu untuk perencanaan pembangunan

Dasar Hukum : Pengumpulan data ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Kerahasiaan data dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Perhatian : Pengumpulan data ini tidak memungut biaya apapun

BLOK II. PRODUKSI IKAN YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN SETIAP BULAN MENURUT JENIS IKAN

A. Isikan jumlah dan nilai produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan per bulan baik yang dijual melalui TPI maupun ditul: selama triwulan laporan menurut jenis ikan

Jenis Ikan	Bulan		Bulan		Bulan		Jumlah	
	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)	Produksi (kg)	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Layang								
2. Bawal								
3. Kembung								
4. Selar								
5. Tembang								
6. Udang Barong								
7. Udang Windu								
8. Udang Jebung								
9. Udang Dogol								
10. Udang Lainnya								
11. T e r i								
12. Tongkol								
13. Kurisi								
14. Lemuru								
15. Cakalang								
16. Tenggiri								
17. Layur								
18. Ikan Terbang								
19. Julung-Julung								
20. Tiga Waja								
21. Ekor Kuning								
22. Ikan Kowe								
23. Petek/Peperek								
24. Manyung								
25. Songot								
26. Cucut								
27. P a r i								
28. Kakap								
29. Sunglir								
30. Bambang								
31. Kerapu								
32. Kurau								
33. Belanak								
34. T u n a								
35. Cumi-Cumi								
36.								
37.								
38.								
39.								
40.								
41.								
42.								
43.								
44. Ikan Campuran								
Jumlah								

Produksi adalah jumlah ikan yang didaratkan di PP selain yang dijual di TPI pada bulan yang bersangkutan selama triwulan laporan

Nilai Produksi adalah nilai seluruh ikan yang didaratkan di PP selain yang dijual di TPI pada bulan yang bersangkutan selama triwulan laporan

Periode triwulan laporan adalah sebagai berikut:

- Triwulan I : periode Januari sampai dengan Maret
 Triwulan II : periode April sampai dengan Juni
 Triwulan III : periode Juli sampai dengan September
 Triwulan IV : periode Oktober sampai dengan Desember

B. Isikan kondisi selama triwulan laporan

1). Jumlah produksi ikan yang didaratkan di pelabuhan selama triwulan laporan dibanding triwulan sebelumnya
 Meningkat - 1 Sama saja - 2 Menurun - 3

2). Jelaskan secara rinci alasannya

.....

BLOK III : RATA-RATA PERAHU/KAPAL YANG MENDARAT SETIAP HARI

Isikan rata-rata perahu/kapal yang mendarat setiap hari per bulan selama triwulan laporan.

Jenis Perahu/Kapal	Bulan	Bulan	Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Perahu Tak Bermotor			
2. Perahu Motor Tempel			
3. Kapal Motor			
Jumlah			

BLOK IV : KETERANGAN RESPONDEN

Data yang tercantum dalam daftar isian diisi dengan sebenarnya dan menurut keadaan yang sesungguhnya.

1. Nama Responden	
2. Jabatan	
3. Tandatangani dan/atau Cap	

BLOK V : KETERANGAN PETUGAS

Bagian ini diisi oleh petugas BPS

1. Nama Pencacah	
2. Tanggal Pencacahan	
3. Tandatangani	
4. Nama Pengawas/Pemeriksa	
5. Tanggal Pengawasan/Pemeriksaan	
6. Tandatangani	

BLOK VI : KONDISI PP

KONDISI PP : **AKTIF -1** **TUTUP SEMENTARA -2** **TUTUP -3**

Aktif adalah jika PP masih melakukan kegiatan pendaratan ikan *walaupun* pada triwulan yang bersangkutan tidak ada kegiatan pendaratan ikan *tetapi* masih akan melakukan kegiatan pendaratan ikan pada triwulan/tahun berikutnya

Tutup sementara adalah jika PP sudah tidak melakukan kegiatan pendaratan ikan dalam jangka waktu tertentu *tetapi* masih akan aktif kembali

Tutup adalah jika PP sudah tidak lagi melakukan kegiatan pendaratan ikan

<http://www.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

